

TINDAK LANJUT PERDA LLAJ

Perwal Penerapan Jalan Searah

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menerbitkan dua peraturan walikota (perwal) terkait penerapan jalan searah. Upaya tersebut untuk mempertegas pengawalan manajemen dan rekayasa lalu lintas sekaligus tindak lanjut adanya perda terkait lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogya Windarto menjelaskan, perda terkait LLAJ sudah ditetapkan tahun 2019 lalu dan berlaku efektif mulai tahun ini. "Sebagai tindaklanjutnya kami terbitkan peraturan walikota. Untuk semakin mempertegas saja," jelasnya, Sabtu (28/11).

Kedua aturan yang diterbitkan yaitu Perwal 139/2020 terkait lalu lintas searah di kawasan Terban dan Sagan, serta Perwal 140/2020 untuk jalan searah di Prawirotaman dan Tirtodipuran. Jalan searah di kawasan tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa tahun silam.

Windarto menyebut, penerbitan perwal itu ditujukan agar penegakan aturan bisa lebih tegas. Terutama jika terjadi pelanggaran arus oleh pengendara karena sudah

ada rambu yang terpasang. "Tidak ada perubahan aturan dari pemberlakuan sebelumnya. Tetapi semakin ditegaskan termasuk mengenai dimensi kendaraan serta perlakuan parkirnya," imbuhnya.

Untuk Jalan Prawirotaman diberlakukan searah ke timur, dan sebaliknya Jalan Tirtodipuran searah ke barat. Kendaraan dengan dimensi panjang lebih dari sembilan meter dilarang melintas kedua ruas jalan tersebut karena kapasitas jalan terbatas. Sedangkan ruang parkir tepi jalan umum yaitu paralel nol derajat. Di sisi selatan untuk Jalan Tirtodipuran dan sisi selatan untuk Jalan Prawirotaman.

Sedangkan di kawasan Sagan dan Terban, jalur searah diterapkan di Jalan Prof Yohanes khusus ke utara dan Jalan C Simanjuntak ke selatan. "Pengaturan jalan searah memungkinkan diperluas untuk kawasan lain. Kapasitas jalan di kota cukup terbatas dan sulit untuk menambah ruas jalan baru sehingga yang memungkinkan dengan manajemen lalu lintas searah," terangnya. **(Dhi)-d**

Koramil Kerja Bakti Bersihkan Pasar Sentul

YOGYA (KR) - Peduli kebersihan lingkungan di masa pandemi Covid-19, Koramil 05 Pakualaman Kodim 0734/Kota Yogya sukses menggelar kerja bakti di Pasar Sentul, Gunung Ketur, Pakualaman Yogya. Kegiatan dengan mengajak komponen masyarakat terutama instansi pemerintah di wilayah Kecamatan Pakualaman

"Hidup bersih dan sehat adalah yang utama, khususnya di tempat umum, karena di situlah tempat dan letaknya kuman penyakit," jelas Danramil 05 Pakualaman Kapten Inf

Surono kepada *KR*, Sabtu (28/11).

Disebutkan kerja bakti melibatkan relawan dan segenap aparat pemerintah di Pakualaman antara lain Camat, Polsek, Linmas Satpol-PP, Lurah Pasar Sentul dan Komunitas Paguyuban Pedagang Pasar di wilayah Kecamatan Pakualaman. Kegiatan dimulai dengan apel pengecekan personel sampai dengan perintah pembagian tugas masing-masing.

"Dengan kerja bakti, sampah di Pasar Sentul dan sekitarnya bisa diatasi dengan baik, tidak mencemari lingkungan sesuai semboyan Pasare Resik Rejekine Apik Duite Kumpul," terang Surono yang tak sungkan terjun langsung membersihkan dan mengangkat sampah-sampah. **(R4)-d**



Koramil Pakualaman bersama warga kerja bakti membersihkan Pasar Sentul.



DISTRIBUSI BANSOS

Perketat Pengawasan Agar Tepat Sasaran

BANTUL (KR) - Era pandemi Covid-19 angka kemiskinan naik dan perekonomian yang sulit membutuhkan peran bersama seluruh stakeholder mengatasi hal ini. Sementara itu pemerintah banyak mengucurkan berbagai jenis dana bantuan sosial (bansos). Dari legislatif berharap pengawasan distribusi bantuan sosial diperketat agar bansos yang diberikan tepat sasaran dan sesuai target.



Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro *SiKom* kepada *KR*, Sabtu (28/11) menuturkan keprihatinannya karena program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal karena pandemi Covid-19 yang melanda.

KR-Rahajeng Pramesi
Nur Subiyantoro *SiKom*

"Hal ini berakibat target penurunan angka kemiskinan tahun ini tidak tercapai. Berdasarkan data, trend di Bantul setiap tahun terdapat penurunan jumlah warga miskin mencapai 0,7 persen pada kondisi normal. Namun dalam kondisi yang tidak normal seperti pandemi dipastikan angka ini tidak tercapai," urai Nur seraya menambahkan saat ini angka kemiskinan di Bantul berada pada angka 12,51 persen.

supaya benar-benar tepat sasaran," tambahnya.

Ditambahkan, dari Pemkab Bantul saat ini memberikan stimulan kepada UMKM dengan harapan sebagai langkah strategis untuk mengejar target pengurangan warga miskin.

Lemahnya perekonomian sejak awal Maret 2020, lanjutnya, berimbas pada gelombang PHK, ribuan buruh dirumahkan dan usaha kecil yang lesu menjadi faktor kuat penyebab bertambahnya warga miskin. Kondisi ini menyebabkan bansos masih harus terus bergulir.

"Kami berharap dana stimulan yang diberikan tepat sasaran dan dari sisi pendataan terus diteliti

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini menuturkan, berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah mengusulkan 26 ribu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan bansos berupa modal usaha Rp 2,4 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun data 26 ribu UMKM ini sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan penyaringan yakni mulai data secara keseluruhan 49 ribu kemudian disaring 40 ribu dan diverifikasi lagi menjadi 26

ribu, namun keputusan akhir jumlah UMKM yang akhirnya mendapatkan bantuan seluruhnya ada di tangan pemerintah pusat.

"Bagi yang mendapatkan diimbau mempergunakan sebaik mungkin. Bansos diberikan sebagai upaya pemerintah menstimulus pelaku UMKM, karena dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami kesulitan karena dampak Covid-19," tegasnya.

Tidak hanya bansos bagi UMKM saja, imbuh Nur, pihaknya berharap Pemkab Bantul dan DPRD Bantul bersinergi dalam upaya pemulihan ekonomi supaya dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

Nur menegaskan, berbagai macam bansos pemerintah yang saat ini ada seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan aneka bansos lain dari pemerintah sangat dimungkinkan pada praktik di lapangan rentan salah sasaran dalam pendistribusian.

"Beberapa kasus seperti data penerima dobel, penerima bantuan hanya orang itu-itu saja, data penerima sudah meninggal atau pindah, penerima bansos yang terdaftar dalam praktiknya bukan merupakan warga miskin (salah sasaran), bahkan warga kalangan berada mendapatkan bansos. Sementara warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan bansos tersebut. Jadi jangan sampai hal seperti ini terjadi," tegasnya. **(Aje)-d**

Kembali ke
Projotamansari
UNTUK BANTUL LEBIH BAIK

1



H. ABDUL HALIM MUSLIH
CALON BUPATI BANTUL



JOKO B PURNOMO
CALON WAKIL BUPATI BANTUL

Wujudke pemerintah sing tanggap, nyembadani,
nyrawungi, nyawiji, lan ndunungake.

1

KANG HALIM MAS JOKO
BANTUL MAJU!



9 DESEMBER 2020
DATANG KE TPS
COBLOS BAJU PUTIH



Drs.H.SUHARSONO



Drs.H.TOTOK SUDARTO,M.Pd

CALON BUPATI & WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL

Mewujudkan Bantul Projotamansari Lebih Maju,
Agamis, dan Unggul

BEBARENGANNOTOBANTULTAMBAHUNGGUL

